

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM  
ALOKASI DANA DESA**

**(Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**OLEH:**

**SELVIANA KALLI GHOPA**

**NIM:2020110012**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

**FAKULTAS EKONOMI**

**MALANG**

**2024**

## **RINGKASAN**

Penerapan keuangan desa dalam pembangunan desa dapat dilakukan melalui Alokasi Dana Desa, yaitu suatu metode pengalokasian dana desa. Program operasional desa didukung oleh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: pengalokasian dana desa, pembinaan pembangunan melalui keuangan desa, dan pengelolaan dana desa. Metodologi penelitian kualitatif dan deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan di kantor Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Desa Kepuharjo memiliki pembangunan desa yang sangat baik, penyaluran dana desa yang halal, dan pembiayaan tahap perencanaan melalui dana pengelolaan desa, berdasarkan temuan penelitian. Namun implementasinya harus dikaji ulang meski sudah sangat baik. peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran dana desa.

**Kata Kunci : Implementasi Keuangan Desa, Pembangunan, Alokasi Dana  
Desa**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ekspansi Indonesia yang pesat berdampak pada sistem politik negara. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menjunjung tinggi gagasan desentralisasi pemerintahan dengan memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk mengekspresikan otonomi daerahnya dalam kerangka hukum. Kepala desa, yang mempunyai tugas pengelolaan utama, bertanggung jawab atas desa, yang merupakan unit politik terendah di Indonesia. Sebagai bagian dari struktur pemerintahannya, pemerintah desa harus mampu menerapkan konsep akuntabilitas yang menyatakan bahwa segala tindakannya harus dilaporkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat desa mendapatkan dana hibah yang cukup besar, tenggat waktu pelaporan yang tidak menentu, dan adanya masa-masa krusial dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian Rivin (2019) menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa mempunyai beban yang berat. Oleh karena itu diperlukan pemerintahan desa yang mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan tata kelola desa yang baik, yang menghendaki agar segala tindakan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan amanah (Baik). Pemerintahan Desa). Untuk meningkatkan standar pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

menciptakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Selain gratis, Skeudes memiliki keuntungan lebih lanjut karena menggabungkan literasi keuangan ke seluruh masyarakat.

Pemerintah Desa Kepuharjo Karangploso kini kurang memperhatikan PEMDes dalam hal pembiayaan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penanaman modal di BUMDes. pemerintah daerah hendaknya berkonsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya kompetensi dan kapabilitas aparat SDM daerah di Pemerintahan Desa Kepuharjo, guna menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan. Situs web Esa harus dioptimalkan dan diperbarui untuk menjamin ketersediaan semua informasi.

Operasi Skeudes saat ini tidak memenuhi persyaratan penanganan keuangan desa, dan hal ini biasa terjadi selama instalasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan aparat desa mengenai tata kelola keuangan, akuntansi, dan keterbukaan dalam menangani dana desa, yang semuanya dapat berujung pada penyelewengan. Pelaporan harus diselesaikan secermat mungkin untuk mencegah adanya penyaringan dalam seluruh proses pelaporan guna menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang diperlukan. Hal ini akan memberikan tata kelola yang efisien dalam pengelolaan dana desa.

Sesuai Trisna dan Wahyuni (2019), hal tersebut terjadi. Penerapan sistem keuangan di suatu desa menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah mulai mengelola dana daerah melalui program-program yang sudah ada.

Pemerintahan daerah dibiarkan berkembang oleh pemerintah pusat agar setiap desa dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberian mandat daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing mereka dengan tetap menjaga fokus pada kesejahteraan dan kepentingan penduduk desa setempat. Selain itu, Pemerintah Daerah Kepuharjo juga telah membuat website dengan pusat teknologi informasi dan komunikasi (ICT center) sebagai upaya mengedukasi masyarakat setempat.

Desa Kepuharjo menggunakan dana pemerintah kota untuk membangun Green Smart Village, salah satu contohnya adalah pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi. Fasilitas yang dimiliki Desa Kepuharjo antara lain adalah BUMDes, perpustakaan desa, dan puskesmas. Selain melengkapi fasilitasnya, Desa Kepuharjo juga telah membentuk berbagai kelompok masyarakat antara lain Karangtaruna, Alasan lain dipilihnya masyarakat Kepuharjo sebagai topik penelitian penelitian ini adalah karena masyarakatnya telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes untuk mengelola keuangannya. Kendala utama dalam penelitian ini adalah Desa Kepuharjo memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga implementasi sistem tidak terlalu sulit.

Akuntansi melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan menyajikannya kepada berbagai pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan selama pengambilan keputusan. konsensus pemerintah mengenai serangkaian standar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang publik. mewajibkan penggunaan standar

akuntansi pemerintah dalam penilaian kinerja organisasi keuangan yang berada di bawah kendali pemerintah. Akuntansi pemerintah memfasilitasi pengelolaan keuangan komunal, daerah, dan desa, yang menjadi landasan pengelolaan keuangan publik. Konsep akuntansi pemerintahan yang berlaku pada pengelolaan keuangan publik, termasuk akuntabilitas dan transportasi, tidak hanya berlaku pada pemerintah federal; hal ini juga berlaku pada pemerintah daerah, seperti desa.

Pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai “segala tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendokumentasian, dan pertanggungjawaban uang desa” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014). Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian siklus yang terpadu secara terpadu dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada konsep akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi serta menganut anggaran yang kaku. Desa kemudian membuat buku pembantu kegiatan yang memuat transaksi dan pengeluaran pemerintah yang berasal dari transfer pendapatan, serta buku kas pembantu kegiatan yang memuat daftar segala kegiatan yang berkaitan dengan setiap bidang atau kegiatan yang dilakukan oleh desa.

Laporan keuangan memberikan rincian mengenai status keuangan masyarakat berdasarkan nilai bersih desa. Laporan keuangan desa disebut dengan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset tetap dan lancar membentuk kategori aset. Aset lancar mencakup uang di bank dan aset likuid lainnya, pendapatan, persediaan, dan aset fisik termasuk bangunan, jaringan, dan jalan.

Guna mengatasi permasalahan yang ada di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso dan untuk memperluas pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan yang dikenal luas, maka penulis melakukan penelitian ini, “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelusuran peneliti dalam penelitian ini hanya sebatas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam pengalokasian dana desa karena latar belakang informasi tersebut di atas.

## **1.3 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dalam pengawasan?
2. Bagaimana perkembangan desa di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?
3. Bagaimana alokasi dana Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Memahami bagaimana Dana Desa Kepuharjo di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dikelola secara finansial
2. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan desa di Kecamatan Karangploso Desa Kepuharjo Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui alokasi dana Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

## **1.5 Paradigma Penelitian**

Penerapan pengelolaan keuangan desa dalam pengalokasian anggaran Desa Kepuharjo menjadi subjek penelitian yang dipilih peneliti. Oleh karena itu, paradigma dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif kualitatif dengan kategori subyektif.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis.**

Agar pembaca dapat mengambil penilaian dalam berbisnis, penelitian berpotensi memberikan informasi, referensi, dan bahan kajian. Terkait dengan pengalokasian uang desa, kesimpulan penelitian ini diyakini dapat memberikan pencerahan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa dilakukan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

- a) Dapat memperluas pemahaman mengenai permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa.
- b) Persyaratan penulisan laporan lengkap di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang bagi mahasiswa jurusan ilmu ekonomi.

#### **2. Bagi Universitas**

- a) Hasil penelitian khususnya yang berkaitan dengan program studi akuntansi dapat menjadi sumber dan bahan ajar bagi generasi mendatang.



b) Pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan dan hubungan baik yang saling menguntungkan dengan berbagai organisasi merupakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk pengalaman.

3. Bagi Instansi

Dapat menjadi nasihat atau rekomendasi yang bermanfaat bagi organisasi.

### **1.7 Ruang Lingkup**

Tujuan penelitian ini hanyalah untuk menghindari kesalahpahaman dengan mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan desa digunakan di Desa Kepuharjo untuk mengalokasikan keuangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- MANDASARI, Y. S. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA SAIT BUTTU SARIBU KECAMATAN PAMATANG SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Manurung, I. S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Rangkuti, M. R. (2017). Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Sari, R. N. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wulandari, S. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Yulihantini, D. T., Sukarno, H., & Wardayati, S. M. (2018). Pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kemandirian dan kinerja keuangan desa Di Kabupaten Jember. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 37-50.
- Yulianah, Y. (2015). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 608-627.
- Afrizah, M. (2020). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Merindu Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti Palembang).